

Studi Kasus Pengelolaan APBD Dalam Meningkatkan Infrastruktur Di Kabupaten Sukabumi

Rama Maulana¹, Salsa Zaira Novita Dewi²

Universitas Nusa Putra

rama.maulana_ak21@nusaputra.ac.id, salsa.zaira_ak21@nusaputra.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan APBD dalam meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Sukabumi. Pengelolaan infrastruktur yang baik menjadi kunci penting dalam pembangunan dan pertumbuhan baik bagi suatu wilayah. Faktor-faktor seperti pengelolaan APBD dapat mempengaruhi alokasi anggaran dan investasi dalam pembangunan infrastruktur.

Dalam penelitian ini, kami menggunakan data dan informasi terbaru yang relevan juga dengan mensurvei kondisi saat ini kabupaten Sukabumi. Meskipun data sebenarnya tidak tersedia untuk tahun yang lebih baru, kami merujuk pada penelitian terkait dan data pendahuluan untuk memberikan gambaran yang akurat. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan APBD yang fleksibel dan progresif dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan infrastruktur di Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk mengoptimalkan pengelolaan APBD dan pengembangan infrastruktur. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami pengelolaan APBD dan peranannya dalam meningkatkan infrastruktur di daerah, dengan harapan dapat menjadi panduan bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengumpulkan data tentang pengelolaan infrastruktur di Sukabumi dan menganalisis pengelolaan APBD di Kabupaten Sukabumi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi

pemerintah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan pengelolaan infrastruktur di Sukabumi dan wilayah sejenis.

Kata kunci: APBD, pengelolaan infrastruktur, alokasi anggaran.

***Abstract:** This study aims to analyze the management of the APBD in improving infrastructure in Sukabumi Regency. Good infrastructure management is an important key in good development and growth for a region. Factors such as APBD management can influence budget allocations and investment in infrastructure development.*

In this study, we used the latest relevant data and information by surveying the current condition of Sukabumi district. While actual data is not available for the more recent year, we refer to related studies and preliminary data to provide an accurate picture. The results of previous research indicate that flexible and progressive APBD management can contribute positively to infrastructure improvement in Sukabumi District.

Based on the findings of this study, it is suggested that the local government of Sukabumi Regency improve coordination and collaboration with various related parties, including the private sector and the community, to optimize APBD management and infrastructure development. This research makes an important contribution in understanding APBD management and its role in improving regional infrastructure, with the hope that it can serve as a guide for other regions facing similar challenges.

This study will use a qualitative analysis method to collect data on infrastructure management in Sukabumi and analyze the management of the APBD in Sukabumi District. It is hoped that the results of this research can provide valuable insights for the government and stakeholders in improving infrastructure management in Sukabumi and similar areas.

Keywords: APBD, infrastructure management, budget allocation.

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Alteng Syafruddin, pengertian APBD adalah rencana kerja pemerintah daerah untuk suatu tahun kerja tertentu dimana di dalamnya terdapat rencana pendapatan serta pengeluaran untuk satu tahun tersebut. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dengan demikian, APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi ini menjadikan APBD penting karena kegiatan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan jika tidak dicantumkan dalam APBD.

Infrastruktur yang baik dan berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu daerah. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan konektivitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kabupaten Sukabumi, sebagai salah satu daerah di Indonesia, menghadapi tantangan dalam meningkatkan infrastruktur guna mendukung

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Ahmad Erani Yustik, salah satu permasalahan pokok APBD dan dalam kasus yang sama, juga APBN adalah terjadinya defisit atau pengeluaran anggaran lebih banyak dari pemasukan yang menghasilkan tidak seimbangnya pengelolaan keuangan, dan dampaknya akan menjadikan tidak maksimalnya pemanfaatan APBD. Beberapa pengalokasian dana juga terlihat timpang jika lebih banyak anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan tetapi alokasi pada tenaga kerja mayoritas, seperti anggaran sektor pertanian dan industri cenderung kecil.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan aspek krusial dalam pembangunan infrastruktur di suatu daerah. Kabupaten Sukabumi, sebagai salah satu daerah di Indonesia, menghadapi tantangan dalam meningkatkan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi praktik pengelolaan APBD di Kabupaten Sukabumi dan dampaknya terhadap peningkatan infrastruktur. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini akan

melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan pengelolaan APBD dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi.

KAJIAN PUSTAKA

APBD

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

APBD merupakan kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD adalah suatu rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) di Indonesia untuk mengatur pendapatan yang diperoleh dan belanja yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

APBD mencakup semua sumber pendapatan yang diharapkan diperoleh oleh pemerintah daerah, seperti pajak, retribusi, dana perimbangan, dan sumber pendapatan lainnya. Selain itu, APBD juga mencakup

semua belanja yang direncanakan untuk pembiayaan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, dan lain sebagainya.

Mekanisme Penyusunan APBD dan Tahapannya Mekanisme penyusunan APBD setidaknya melalui tiga tahap yang melibatkan perencanaan, pembahasan, hingga pelaksanaan. Berikut tahapan-tahapan penyusunan APBD:

- 1) Tahap Perancangan dan Pengajuan APBD dirancang dan diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Tahap ini akan berlangsung pada minggu pertama bulan Oktober di tahun sebelum penetapan anggaran.
- 2) Tahap Pembahasan dan Persetujuan Rancangan APBD (RAPBD) akan dibahas oleh pemerintah daerah dengan usulan dari DPRD. Selain itu, DPRD juga akan memutuskan untuk setuju atau tidak mengenai RAPBD tersebut. Keputusan harus diambil selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang dibahas dilaksanakan. Jika rancangan disetujui DPRD, RAPBD akan ditetapkan sebagai APBD melalui peraturan daerah (Perda). Namun, apabila RAPBD tidak disetujui, pemerintah

dapat melaksanakan pengeluaran tidak lebih besar daripada anggaran APBD di tahun sebelumnya.

- 3) Tahap Pelaksanaan Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, ketentuan lebih detail soal pelaksanaannya lebih lanjut akan dituangkan melalui keputusan gubernur/walikota/bupati.
- 4) Tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Penyampaian laporan ini telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Kepala daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berupa laporan keuangan, kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

APBD memiliki peran yang penting dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengalokasikan sumber daya keuangan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah tersebut.

Infrastruktur

Menurut N. Gregory Mankiw dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ekonomi tahun 2003, digambarkan bahwa infrastruktur berarti wujud modal publik atau public capital sebagai bentuk investasi pemerintah dalam bentuk segala jenis fasilitas umum seperti jalan umum, sistem saluran pembuangan umum, jembatan untuk kebutuhan publik, dan sebagainya.

Menurut Robert J. Kodoatie pun menggambarkan definisi infrastruktur sebagai sistem yang dapat mendukung sistem sosial dan kehidupan ekonomi yang sekaligus menjadi suatu penghubung sistem lingkungan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan atau aturan.

Infrastruktur merujuk pada sekumpulan fasilitas fisik yang digunakan untuk mendukung aktivitas manusia, seperti transportasi, komunikasi, energi, air, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur membentuk kerangka dasar suatu wilayah yang memungkinkan ekonomi, sosial, dan kegiatan masyarakat berjalan lancar.

Infrastruktur melibatkan berbagai jenis bangunan, jaringan, sistem, dan fasilitas yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, atau kombinasi keduanya. Terdapat beberapa contoh infrastruktur beserta fungsinya:

- 1) Jembatan berfungsi sebagai penghubung antara satu tempat dengan tempat lainnya. Tempat tersebut dapat merupakan suatu daerah maupun kota.
- 2) Jalan menurut fungsinya dikelompokkan kedalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteri (untuk perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi), jalan kolektor (untuk perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang), jalan local (untuk perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah), jalan lingkungan (perjalanan dekat, kecepatan rata-rata rendah).
- 3) Rumah berfungsi sebagai tempat tinggal. Tempat untuk berteduh dan melakukan aktivitas.

Infrastruktur yang baik dan terpelihara dengan baik menjadi landasan penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, konektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk perdagangan, industri, pariwisata, layanan publik, dan lain sebagainya.

Pengaruh APBD Terhadap Infrastruktur

Adanya APBD dalam pemerintahan menjadi bentuk kebijakan pemerintah dalam pengalokasian dana yang lebih merata. Terdapat fungsi adanya APBD bagi daerah antara lain:

- 1) Fungsi Otorisasi, yaitu dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi dasar pada periode (tahun) tertentu agar kegiatan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
- 2) Fungsi Perencanaan, artinya perencanaan dan penyusunan kegiatan pada tahun yang bersangkutan memerlukan APBD untuk menjadi landasan dan acuan kegiatan.
- 3) Fungsi Pengawasan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi acuan dalam menilai dan mengkaji kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 4) Fungsi Alokasi, diperlukan pengarahan anggaran daerah untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.

Ada kaitan yang erat antara APBD dan infrastruktur. Berikut adalah beberapa aspek kaitan antara keduanya:

- 1) Pendanaan Infrastruktur: APBD merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah, termasuk untuk pendanaan pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah mengalokasikan sebagian anggaran dalam APBD untuk membiayai proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, saluran air, dan lain sebagainya.
- 2) Perencanaan dan Penganggaran: Proses penyusunan APBD melibatkan perencanaan dan penganggaran kegiatan infrastruktur. Pemerintah daerah merencanakan kebutuhan infrastruktur dalam jangka pendek dan jangka panjang serta mengalokasikan dana yang cukup dalam APBD untuk merealisasikan proyek-proyek tersebut.
- 3) Pembangunan dan Pemeliharaan: APBD digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur baru dan juga pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada. Dana yang dialokasikan dalam APBD digunakan untuk membangun, memperbaiki, dan memelihara fasilitas infrastruktur agar tetap beroperasi dengan baik.
- 4) Pengawasan dan Akuntabilitas: APBD juga berperan dalam pengawasan

penggunaan dana untuk infrastruktur. DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi penggunaan anggaran dan melihat apakah dana yang dialokasikan untuk infrastruktur digunakan dengan tepat sesuai rencana.

- 5) Dampak Ekonomi dan Sosial: Infrastruktur yang baik dan terpelihara dengan baik, yang didukung oleh alokasi dana yang memadai melalui APBD, dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai juga dapat meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan pelayanan publik, serta menciptakan lapangan kerja dalam sektor konstruksi.

Dengan demikian, APBD berperan penting dalam mendukung pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk memajukan daerah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

METODOLOGI

Metode studi literatur review adalah pendekatan penelitian yang melibatkan penyelidikan, evaluasi, dan sintesis literatur yang relevan dengan topik atau pertanyaan penelitian tertentu. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian terdahulu,

temuan, teori, dan pendekatan yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.

Dalam bidang penelitian terutama pembuatan karya ilmiah, literature review lebih dikenal dengan istilah tinjauan Pustaka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa literature review adalah suatu kegiatan menganalisis yang dapat berupa kritikan dari suatu penelitian yang sedang dilakukan terhadap suatu topik khusus yang merupakan bagian dari bidang keilmuan.

Isi yang ada di dalam literature review ini berupa penjelasan atau pembahasan tentang teori dari suatu temuan atau topik penelitian. Dari penjelasan teori-teori tersebut dapat dijadikan sebagai landasan teori dalam membuat karya ilmiah atau dalam melakukan kegiatan penelitian. Selain itu, penelitian yang sedang melakukan ini bisa berupa pengembangan dari penelitian sebelumnya atau bisa juga penelitian yang baru pertama kali dilakukan.

Ketika ingin melakukan atau membuat literature review bisa menggunakan beberapa metode, yaitu metode systematic mapping study, systematic literature review, dan traditional review.

Banyaknya peneliti yang menggunakan literature review bukan tanpa alasan, karena literature review itu sendiri memiliki beberapa manfaat diantaranya:

- 1) Mengetahui Perkembangan Ilmu Pengetahuan (Bidang Tertentu)
- 2) Mengetahui Metode atau Teknik dalam Membuat Karya Ilmiah
- 3) Menambah Ilmu Pengetahuan
- 4) Mengetahui Hasil Penelitian yang Saling Berhubungan
- 5) Menentukan Topik Pembahasan dan Permasalahan yang Akan Diteliti

Langkah-langkah umum dalam metode studi literatur review adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan Tujuan dan Ruang Lingkup: Identifikasi tujuan penelitian Anda dan batasan ruang lingkup topik yang ingin Anda tinjau dalam studi literatur review.
- 2) Menentukan Kriteria Pencarian: Tentukan kriteria yang spesifik untuk pemilihan literatur yang relevan dengan penelitian Anda, seperti tahun publikasi, jenis publikasi, metodologi penelitian, atau sumber data tertentu.
- 3) Pencarian Literatur: Lakukan pencarian literatur melalui basis data akademik, jurnal ilmiah, perpustakaan digital, dan sumber informasi lainnya sesuai dengan kriteria pencarian yang telah ditentukan.
- 4) Seleksi dan Penyaringan Literatur: Evaluasi dan seleksi literatur

berdasarkan relevansi dengan topik penelitian Anda. Baca abstrak, ringkasan, atau bagian-bagian penting dari artikel ilmiah untuk memutuskan apakah literatur tersebut sesuai dengan penelitian Anda.

- 5) Pembacaan dan Analisis Literatur: Membaca, memahami, dan menganalisis literatur yang terpilih. Identifikasi tema utama, perbedaan pendekatan, perdebatan, dan temuan yang muncul dari literatur tersebut. Buat catatan dan rangkuman yang rinci.
- 6) Sintesis dan Interpretasi: Sintesis dan interpretasikan temuan dari literatur yang telah Anda tinjau. Identifikasi pola, persamaan, perbedaan, dan kontribusi yang relevan dengan pertanyaan penelitian Anda.
- 7) Penulisan dan Pelaporan: Tulis laporan studi literatur review yang mencakup latar belakang penelitian, metode yang digunakan, temuan yang signifikan, dan kesimpulan yang diambil dari analisis literatur yang dilakukan.

Metode studi literatur review sering digunakan dalam penelitian untuk membangun landasan teoritis, mengidentifikasi kesenjangan penelitian,

atau mendukung perumusan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik. Studi literatur review juga memberikan gambaran luas tentang penelitian yang telah dilakukan dalam suatu bidang dan memperkaya pemahaman kita tentang topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan APBD Kabupaten Sukabumi

DPRD bersama pemerintah Kabupaten Sukabumi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

APBD Sukabumi disahkan dengan angka defisit diproyeksikan sebesar Rp50 miliar lebih. Pengesahan dari Raperda ke Perda APBD tahun 2023 tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023, di ruang rapat gedung DPRD jalan Komplek Perkantoran Jajaway Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Kamis (8/12/2022).

Adapun rincian struktur APBD tahun anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur yang disepakati oleh Badan

anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yakni Pendapatan daerah sebesar Rp 4.117.862.148.383,00, proyeksi belanja daerah sebesar Rp4.168.280.906.805,00, kemudian selisih dari proyeksi pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah pada tahun 2023 diasumsikan defisit Rp 50.418.758.422,00.

Peningkatan Infrastruktur Di Kabupaten Sukabumi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dari pusat hingga daerah. Dengan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tepat sasaran, pengembangan ekonomi di daerah akan lebih efisien dan efektif, ongkos produksi dapat ditekan, sehingga berimbas pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) Kemenko Marves, Djoko Hartoyo saat menjadi narasumber dalam Talkshow bertema “Pemantapan Daya Saing Ekonomi Melalui Peningkatan Infrastruktur Daerah,” yang menjadi bagian dari kegiatan Musrenbang Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 di Sukabumi, 15 Maret 2023.

Dalam paparannya, Asdep IPW menyampaikan progres dari implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabar Bagian Selatan (Jabarsel). Sebagai bagian dari wilayah pengembangan Jabarsel, Kemenko Marves bersama kementerian dan dinas terkait saat ini sedang menyiapkan sejumlah pembangunan infrastruktur di Sukabumi, diantaranya Pelabuhan Pengumpan; Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB); Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan; Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan; Budidaya Lobster dan Sidat; Pengembangan Kawasan Tambak Udang; hingga Pengembangan Desa Digital.

Perbandingan Data APBD Tahun 2021 - 2023

Berdasarkan data dari Kemenkeu, diperoleh Postur APBD Kabupaten Sukabumi dalam tiga tahun kebelakang terhitung dari 2021 – 2023 sekarang.

Pada tahun 2021 diperoleh Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Audited 2021, - data diterima SIKD per 01 Juli 2023, yang mana rincian datanya sebagai berikut :

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	3.993,71 M	4.184,60 M	104,78
Belanja Daerah	3.983,99 M	4.059,03 M	101,88
Surplus/(Defisit)	9,72 M	125,57 M	1.292,39
Pembiayaan Daerah	-9,72 M	52,43 M	-539,60

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Anggaran pendapatan daerah 2021 dalam anggaran/pagu senilai 3.993,71 M dalam realisasinya sebesar 4.184,60 M, Belanja daerah senilai 3.983,99 M dalam realisasinya sebesar 4.059,03 M, Surplus(deficit) sebesar 9,72 M dalam realisasinya sebesar 125,57 M, serta Pembiayaan daerah -9,72 M dalam realisasinya sebesar 52,43 M.

Pada tahun 2022 diperoleh Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember 2022, - data diterima SIKD per 30 Juni 2023, yang mana rincian datanya sebagai berikut :

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	3.944,67 M	4.107,55 M	104,13
Belanja Daerah	3.918,05 M	4.057,58 M	103,56
Surplus/(Defisit)	26,62 M	49,98 M	187,76
Pembiayaan Daerah	-26,62 M	134,01 M	-503,47

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Anggaran pendapatan daerah 2022 dalam anggaran/pagu senilai 3.944,67 M dalam realisasinya sebesar 4.107,55 M, Belanja daerah senilai 3.918,05 M dalam realisasinya sebesar 4.057,58 M,

Surplus(deficit) sebesar 26,62 M dalam realisasinya sebesar 49,98 M, serta Pembiayaan daerah -26,62 M dalam realisasinya sebesar 134,01 M.

Pada tahun 2023 diperoleh Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Juni 2023, - data diterima SIKD per 01 Juli 2023, yang mana rincian datanya sebagai berikut :

Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	4.117,86 M	1.458,65 M	35,42
Belanja Daerah	4.168,28 M	1.344,44 M	32,25
Surplus/(Defisit)	-50,42 M	114,22 M	-226,54
Pembiayaan Daerah	50,42 M	-35,64 M	-70,69

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Anggaran pendapatan daerah 2023 dalam anggaran/pagu senilai 4.117,86 M dalam realisasinya sebesar 1.458,65 M, Belanja daerah senilai 4.168,28 M dalam realisasinya sebesar 1.344,44 M, Surplus(deficit) sebesar -50,42 M dalam realisasinya sebesar 114,22 M, serta Pembiayaan daerah 50,42 M dalam realisasinya sebesar -35,64 M.

Dapat disimpulkan bahwa anggaran yang diberikan pemerintah pusat pada daerah terhitung pada 3 tahun kebelakang anggarannya meningkat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan APBD dalam meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Sukabumi.

Dalam hasilnya menyatakan bahwa anggaran APBD Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Secara keseluruhan, anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2021, anggaran pendapatan daerah sebesar 3.993,71 M dengan realisasi sebesar 4.184,60 M, sedangkan belanja daerah sebesar 3.983,99 M dengan realisasi sebesar 4.059,03 M. Terdapat surplus sebesar 9,72 M dalam realisasi, dengan pembiayaan daerah sebesar -9,72 M.

Pada tahun 2022, anggaran pendapatan daerah naik menjadi 3.944,67 M dengan realisasi sebesar 4.107,55 M. Belanja daerah juga mengalami peningkatan menjadi 3.918,05 M dengan realisasi sebesar 4.057,58 M. Surplus mengalami peningkatan menjadi 26,62 M dalam realisasi, dengan pembiayaan daerah sebesar -26,62 M.

Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan dalam realisasi anggaran. Anggaran pendapatan daerah sebesar 4.117,86 M dengan realisasi hanya sebesar 1.458,65 M, sedangkan belanja daerah sebesar 4.168,28 M dengan realisasi sebesar 1.344,44 M. Terjadi defisit sebesar -50,42 M dalam realisasi, dengan pembiayaan daerah sebesar 50,42 M. Kesimpulan dari data tersebut adalah bahwa pemerintah pusat memberikan

peningkatan anggaran kepada Kabupaten Sukabumi selama tiga tahun terakhir. Namun, terdapat penurunan yang signifikan dalam realisasi anggaran pada tahun 2023. Hal ini memerlukan penilaian kritis untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan penurunan tersebut, apakah disebabkan oleh kesalahan dalam metode yang dipilih, validitas data, atau faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan.

Bagi peneliti tingkat lanjut atau pembaca umum, temuan ini dapat menjadi dasar untuk lebih memahami pola perencanaan anggaran dan realisasi di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab penurunan signifikan dalam realisasi anggaran pada tahun 2023 dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Keterbatasan utama dari penelitian ini adalah keterbatasan data yang disajikan, terutama terkait dengan realisasi anggaran pada tahun 2023. Peneliti atau pembaca dapat mempertanyakan validitas data yang ada dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil dan kesimpulan. Oleh karena itu, diperlukan penilaian kritis terhadap data yang tersedia dan interpretasi yang akurat untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran temuan.

REFERENSI

Jurnal

Habiburrahman, Rahmah Imani. (2016). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung. Diterima dari Jurnal Vol 6, No 2 .

Internet

Nurulku.com | Managed by DS Media. (2022). Pengertian APBD menurut para ahli: fungsi, tujuan dan cara penyusunan. Diterima dari <https://www.nurulku.com/pengertian-apbd-menurut-para-ahli-fungsi-tujuan-dan-cara-penyusunan.html>

M. Faiqul Balda Assajad. (2022). Permasalahan dalam penyusunan APBD. Diterima dari <https://www.kompasiana.com/faiqulbalda/625340043794d122d95cfbc2/permasalahan-dalam-penyusunan-apbd?page=all#section1>

Tira Santia. (2022). Sri Mulyani Blak-blakan 3 Masalah Pengelolaan APBD 2021. Diterima dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4856558/sri-mulyani-blak-blakan-3-masalah-pengelolaan-apbd-2021>

Aris Kurniawan. (2023). Definisi Serta Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DI Indonesia. Diterima dari <https://www.gurupendidikan.co.id/apbd/>

Yonada Nancy, Addi M Idhom, Yulaika Ramadhani. (2022). Bagaimana Mekanisme Penyusunan APBN dan APBD serta Tahapannya?. Diterima dari <https://tirto.id/bagaimana-mekanisme-penyusunan-apbn-dan-apbd-serta-tahapannya-ga6x>

ID Cloud Host (PT Cloud Hosting Indonesia). (30 April 2020). Mengenal apa itu Infrastruktur : Arti, Jenis, Komponen, dan Contoh Infrastruktur. Diterima dari <https://idcloudhost.com/blog/mengenal-apa-itu-infrastruktur-arti-jenis-komponen-dan-contoh-infrastruktur/>

Cindy Monica Febrian. (2022). Pentingnya Peran APBD Terhadap Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat. Diterima dari <https://www.kompasiana.com/cindy84830/6252f91792cb5a49fc7eaa23/pentingnya-peran-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-terhadap-pembangunan-daerah-dan-kesejahteraan-masyarakat>

Gilang P. (2021). Literature Review : Pengertian, Metode, Manfaat, dan Cara Membuat.
Diterima dari https://www.gramedia.com/literasi/literature-review/#Apa_Itu_Literature_Review

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi by administrator. (2023). Diterima dari <https://maritim.go.id/detail/kemenko-marves-siap-kawal-pembangunan-infrastruktur-di-sukabumi>

Denis Febrian. (2022). APBD Sukabumi 2023 Disahkan dengan Proyeksi Defisit Rp 50 Miliar.
Diterima dari https://www.sukabumiupdate.com/keuangan/109716/apbd-sukabumi-2023-disahkan-dengan-proyeksi-defisit-rp-50-miliar#google_vignette